

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Studi hubungan internasional sebagai suatu ilmu memiliki cakupan yang sangat luas termasuk di dalamnya adalah diplomasi. Dalam percaturan di dunia internasional, diplomasi merupakan suatu upaya yang paling sering dilakukan oleh negara-bangsa karena dianggap lebih efektif untuk mencapai kepentingan nasional. Sedangkan bentuk diplomasi adalah bermacam-macam termasuk diplomasi kebudayaan. Pada masa sekarang ini, penggunaan dimensi kebudayaan sebagai sarana diplomasi pun menjadi semakin penting karena dilakukan dengan cara damai dan tanpa menggunakan kekerasan serta tanpa unsur paksaan. Kebudayaan seperti kita ketahui memiliki arti yang luas karena sebagai suatu dimensi yang makro, kebudayaan bukan sekedar suatu kesenian ataupun adat istiadat saja tetapi juga merupakan segala bentuk hasil dan upaya manusia. Hal ini berarti bahwa film dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kebudayaan karena film tercipta dari hasil cipta, rasa, dan karsa manusia.

Penelitian film sebagai ikhtiar *imagologi* suatu masyarakat terhadap masyarakat lain masih belum banyak dilakukan. Apalagi sebuah penelitian yang bersifat komprehensif yaitu meletakkan film sebagai media pada ruang sosial, politik, dan budaya disertai efek-efek yang melingkupinya jarang sekali ditemukan. Hal ini membuat penulis tertarik dengan permasalahan film sebagai media yang melakukan proses pencitraan masyarakat terhadap masyarakat lain

secara teoritis maupun praktis. Dari pantauan sementara sedikitnya penelitian-penelitian tentang keterlibatan film dalam menciptakan *image* masyarakat serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya disebabkan oleh peletakan film dalam tatanan murni untuk hiburan. Padahal fungsi film juga digunakan sebagai interpretasi terhadap keadaan suatu masyarakat.

Dalam kehidupan politik, film akan menjadi bahasa politik, media propaganda, dan alat kampanye politik. Sedang pada wilayah hubungan antar ideologi, film digunakan sebagai senjata untuk saling meruntuhkan nilai ideologi kedua belah pihak. Dan pada kisaran hubungan masyarakat dalam sistem global, film menjadi alat pengenalan dimana masyarakat yang satu mengemukakan diri atau menilai masyarakat lain dengan segala caranya sehingga terbentuklah pemahaman identitas dari masyarakat pembuat film terhadap masyarakat penikmat film. Proses interaksi melalui film sebagai bahasa simbol inilah yang pada akhirnya menjadi peristiwa yang berefek tidak kecil.

Ada dua alasan pokok yang mendorong penulis menetapkan judul "Peran Film Terhadap Diplomasi Kebudayaan Amerika", sebagai judul penelitian. Alasan pertama adalah karena Amerika Serikat merupakan pusat industri perfilman terbesar di dunia, dimana dengan kemajuan teknologi audio visual yang dimilikinya Amerika telah berhasil merajai industri perfilman dunia sejak masa Perang Dunia II.

Alasan kedua kecenderungan yang terjadi di Amerika Serikat adalah bahwa film-film yang diputar khususnya film-film yang bertemakan tentang peperangan menjadi salah satu bidang utama yang digunakan untuk meng-

imajinasikan ulang atau mendistorsi sejarah. Dalam setiap film bertema perang yang diproduksi, sosok Amerika selalu digambarkan sebagai sosok pahlawan bagi dunia, sedangkan bangsa-bangsa lain di dunia dimunculkan tidak lebih hanya untuk memberikan latar belakang (*background*) bagi pahlawan-pahlawan Amerika dan untuk menyediakan penjahat-penjahat yang harus dikalahkan oleh Amerika Serikat.<sup>1</sup> Hal ini berarti bahwa terjadi pertentangan masyarakat dunia antara fakta dengan realita yang disuguhkan kepada masyarakat dunia dimana melalui rekayasa film yang diciptakannya diharapkan akan mampu membentuk opini publik yang positif terhadap Amerika Serikat.

## B. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di Amerika Serikat dalam upaya menciptakan *image* yang positif di mata dunia melalui film-film yang diproduksi. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana perluasan wacana peran media dalam pembangunan persepsi suatu masyarakat terhadap masyarakat lain. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana dan pengembangan wawasan serta pola pikir logis sistematis sebagai mahasiswa.

---

<sup>1</sup> Ziauddin Sardar, Meryll Wyn Davis, *Mengapa Orang Membenci Amerika*, Classic Press, Batam, 2004, hal 245

### C. Latar Belakang Masalah

Apabila menyaksikan dan mencermati sebuah film kita akan mendapatkan pesan-pesan yang disampaikan oleh si pembuat film tersebut. Pesan yang dibawa oleh suatu film akan mencerminkan pandangan pembuat film terhadap sesuatu hal yang ada dan terjadi di sekelilingnya. Film sebagai suatu karya atau sebuah hasil interpretasi seseorang akan sesuatu menjadikan film sebagai ungkapan atau curahan orang tersebut dan merasa perlu untuk diketahui oleh orang lain dan berharap orang yang melihat dan menikmati film tersebut akan mengetahui dan memahami apa yang ingin disampaikan oleh pembuat film tersebut.

Film yang banyak diminati oleh orang banyak adalah film-film yang tidak perlu dipahami lebih lanjut, atau dengan kata lain film yang banyak diminati adalah film yang mempunyai jalan cerita yang ringan karena pada saat menonton film orang hanya bertujuan untuk mendapatkan suatu hiburan. Film seperti halnya hasil karya berkesenian dari seseorang maka karya seni tersebut harus juga memiliki unsur-unsur yang dapat dinikmati orang lain.

Sebagai suatu hasil karya seni dari seniman, film memiliki kelebihan dibandingkan dengan seni lainnya karena film tidak hanya dinikmati oleh orang hanya melalui indera penglihatannya saja tetapi juga melalui indera pendengaran. Karena gambar filmis adalah gambar sesuatu bukanlah gambar tentang sesuatu, dimana ketika kita menyaksikan sebuah film kita akan menyaksikan sebuah gambar yang bersifat jelas dan nyata. Karena gambar *filmis* adalah sebuah

gambar yang mempunyai reproduksi tinggi akan kenyataan fisik yang diabadikan.

Seperti halnya bentuk kesenian lainnya, film juga mempunyai pengelompokan. Film dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu film cerita dan film non cerita atau non fiksi.<sup>2</sup> Film cerita atau fiksi adalah film yang dibuat berdasarkan atas cerita yang dikarang dan pada umumnya bersifat komersial, karena film tersebut dibuat dengan tujuan untuk dipertontonkan kepada khalayak umum dengan harapan akan mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Film cerita digolongkan lagi menjadi berbagai jenis atau genre seperti film horor, laga, komedi, drama, perang, sejarah, musikal dan sebagainya. Sedangkan pengelompokan yang kedua adalah pengelompokan film yang bersifat non cerita yaitu film yang dibuat berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi dan kamera hanya berfungsi untuk merekam kejadian tersebut. Film jenis ini tidak memiliki nilai ekonomis. Film non cerita digolongkan menjadi dua jenis yaitu film berita dan film dokumentasi. Film berita (*news reel*) menitikberatkan pada segi pemberitaan suatu kejadian aktual, seperti film berita dalam siaran televisi. Sedangkan film dokumentasi adalah film yang dibuat dengan cara hanya merekam kejadian tanpa adanya pengolahan lebih lanjut.

Film yang pada perkembangannya telah menjadi sebuah kebutuhan hidup seseorang, menjadikan film dapat dipergunakan oleh penguasa atau pemerintah untuk membangun opini publik agar sesuai dengan opini penguasa mengenai sesuatu hal. Pemerintah yang ingin membangun sebuah opini publik mengenai

---

<sup>2</sup> Marselli Sumarno, *Dasar-dasar Apresiasi Film*, Grasindo, Jakarta, 1996, hal 10

sesuatu isu maka pemerintah harus dapat menguasai media yang banyak diminati oleh publik. Karena film merupakan sebuah bentuk komunikasi dalam artian pembuat film harus bisa berkomunikasi dengan publik secara luas tidak hanya terbatas pada sekelompok orang saja.

Film juga digunakan oleh penguasa atau negara sebagai alat propaganda, dan sebagai alat propaganda film menjadi surat alat yang paling efektif. Seperti kita ketahui bersama film dan industri film telah menjadi suatu kebutuhan dari setiap individu, kelompok bahkan negara baik yang bersifat ekonomis maupun tidak. Film juga dapat diklasifikasikan dengan sebuah industri, dimana dalam sebuah industri memerlukan suatu kerja team (*team work*) yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

Industri film yang terkenal antara lain adalah industri film Hollywood, Hongkong, dan Bollywood (India). Industri film tersebut memiliki jaringan distribusi yang terkoordinasi, seperti industri film Hollywood yang menguasai sebagian besar dari industri perfilman dunia. Dikatakan menguasai sebagian besar karena film-film Hollywood lebih banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan film-film Hongkong apalagi India. Film Hollywood lebih menarik karena mengangkat tema-tema yang bervariasi, dibandingkan dengan film India yang bertemakan dan beralur hampir sama antara satu film dengan film yang lain. Pada perkembangan selanjutnya, industri perfilman Amerika menjadi alat diplomasi politik yang paling populer. Hal ini menjadikan suatu batasan yang tidak jelas antara suatu produksi hiburan atau produksi propaganda. Dalam artikel David Robb pada majalah Brill's Content yang berjudul "Hollywood Wars"

dijelaskan bahwa para pembuat film di Amerika ( khususnya film perang ) harus mengadakan kerjasama dengan Pentagon. Hubungan yang dekat antara Hollywood dengan Pentagon telah terjalin sejak lama, bahkan sejak dimulainya film bisu di Amerika dan dalam surat internal di kalangan militer Amerika sendiri. Pentagon mengakui bahwa film-film Hollywood adalah alat promosi yang paling efektif terhadap diplomasi kebudayaan Amerika.

Hubungan antara pembuat film dengan pusat angkatan bersenjata Pentagon, ditulis dalam sebuah artikel yang berjudul Hollywood Wars. Dalam artikel tersebut, sang penulis, David Robb seakan ingin memajukan bahwa para pembuat film di Amerika yang menginginkan film perang yang mereka buat kelihatan tampak meyakinkan, harus mengadakan kerja sama dengan Pentagon untuk mendapat bantuan penyediaan berbagai peralatan dan sarana penunjang lain untuk kesuksesan film tersebut, mulai dari tank, pesawat tempur, hingga kapal selam nuklir. Syaratnya hanya satu; dalam film yang diproduksi tersebut, pasukan Amerika harus tampak heroik, selalu menang sehingga akan memberikan kredit positif bagi pasukan Amerika.

Dalam artikel yang sama, David Robb juga membuat daftar panjang antar film yang disertai dan tidak direstui oleh Pentagon yang menyangkut perang-perang Amerika. Pearl Harbour, yang diproduksi oleh rumah produksi Buana Vista pada tahun 2001 merupakan salah satu film yang sangat direstui oleh Pentagon karena film tersebut benar-benar menceritakan tentang semangat nasionalisme bangsa Amerika yang berkobar-kobar dalam melakukan serangan balik terhadap Jepang atas serangan mendadak yang dilakukan oleh Jepang

terhadap pangkalan militer Pearl Harbour di kepulauan Hawaii yang menjadi jantung kekuatan Amerika.

Film cerita berlatar perang sepanjang lebih tiga jam dan menghabiskan lebih 150 juta dollar AS ini ditulis oleh Randal Wallace yang menceritakan tentang kisah cinta segitiga antar dua sahabat Rafe Mc Cawley (Ben Affleck) dan Danny Walker (Josh Harnett) dengan Evelyn Johnson (Kate Beckindale).

Pemutaran film ini diawali ketika Rafe sebagai anggota militer AS menjadi relawan untuk berperang di pihak Inggris yang kedodoran melawan Jerman. Pesawat Rafe tertembak jatuh ke laut, dan membuat kekasihnya Evelyn Johnson sangat kehilangan. Tanpa direncana, dua orang yang sama-sama kehilangan Rafe, yaitu Danny dan Evelyn, saling jatuh cinta.

Cerita itu berkembang diselingi berbagai adegan yang menggambarkan Pearl Harbour yang nyaman dan aman sementara Jepang, mengintai kesempatan emas. Adegan-adegan ulang alik antara kompleks militer Hawaii, pusat-pusat militer AS bahkan istana kepresidenan, serta markas militer Jepang ini digarap sedemikian rupa sehingga penonton lebih bersimpati kepada Amerika.<sup>3</sup>

#### **D. Pokok Permasalahan**

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah "Bagaimana Peran Film Terhadap Diplomasi Kebudayaan Amerika?".

---

<sup>3</sup> Ignatius Haryanto. *Hollywood dan Perang Amerika*. Minggu, 6 Januari 2002 (www.kompas.com).



## E. Kerangka Berfikir

Untuk menjawab serta menganalisa pokok permasalahan di atas maka penulis menggunakan konsep pokok, yaitu Konsep Diplomasi Kebudayaan termasuk di dalamnya adalah konsep propaganda.

### i. Konsep Diplomasi Kebudayaan

Secara konvensional, pengertian diplomasi adalah sebagai usaha suatu negara bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasional di kalangan masyarakat internasional.<sup>4</sup> Sedangkan kebudayaan secara makro atau dalam pengertian umum berarti segala hasil dan upaya budi daya manusia terhadap lingkungan.<sup>5</sup> Selain itu, secara makro juga disebutkan bahwa pengertian kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri masyarakat dengan proses belajar.<sup>6</sup>

Dengan demikian diplomasi kebudayaan dapat diartikan sebagai usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingannya melalui dimensi kebudayaan baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga dan kesenian ataupun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas utama misalnya : propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, ataupun militer.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> K. J. Holsti, *International Politics, A Frame Work for Analysis*. Prentice Hall of India. New Dehli. Third Edition, pp 82-83.

<sup>5</sup> J.W.M. Bakker S.J. *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1984, hal 14-36

<sup>6</sup> Kuntjaraningrat, *Pengantar Antropologi Budaya*, Aksara Baru Jakarta, 1979, hal 193.

Secara makro Diplomasi Kebudayaan adalah usaha-usaha suatu negara dalam upayanya memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui kebudayaan, termasuk didalamnya adalah pemanfaatan bidang-bidang ideologi, teknologi, politik, ekonomi, militer, sosial kesenian dan lain-lain dalam percaturan masyarakat internasional.<sup>6</sup>

Sarana Diplomasi Kebudayaan adalah segala macam alat komunikasi, baik media elektronik maupun cetak, yang dianggap dapat menyampaikan isi atau misi politik luar negeri tertentu, termasuk didalamnya : sarana politik maupun militer.

Kegiatan diplomatik telah ada sejak politik ada. Namun baru pada abad ke-15 diberi bentuk resminya yang disebut "Sistem Duta" oleh negara Italia, yang kemudian langsung menyebar ke seluruh Eropa. Mengenai diplomasi, sebuah definisi yang klasik tetapi sering dipakai sebagai acuan adalah dari Harold Nickholson yang menulis bahwa ada 2 hal yang dimaksud dengan diplomasi, yaitu:<sup>4</sup>

1. Diplomasi dalam arti sempit, yang berarti proses komunikasi antar pemerintah antar negara melalui para dutanya (dikenal dengan istilah perundingan/negotiation).
2. Dalam arti luas, yang berarti cara/teknik kebijaksanaan luar negeri suatu negara dalam mempengaruhi sistem internasional (yang disebut pembuatan kebijaksanaan luar negeri/foreign policy making).

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal 25.

<sup>4</sup> Harold Nicholson, *Diplomacy*, Oxford University Press, London, 1960, hal. 11.

Pada awalnya diyakini bahwa pengertian yang pertama sudah mencakup semua kontak dan hubungan resmi dan damai antar negara. Namun sekarang pengertian diplomasi menjadi semakin meluas karena pemerintah sekarang mempunyai cara-cara lain yang dapat dianggap sebagai diplomasi, seperti misalnya: pernyataan kepada publik (press release) melalui media massa, pertukaran kunjungan atau pidato oleh tokoh-tokoh berpengaruh, sampai dengan pertukaran misi-misi kesenian, hibah atau pinjaman luar negeri, pertandingan olah raga, alih teknologi, dan bantuan keamanan.

Diplomasi mempunyai peran yang sangat beragam, dan banyak untuk bermain di dalam hubungan Internasional. Upaya manusia untuk memecahkan persoalan perang dan damai telah dianggap sebagai metode manusia yang paling tua. Dalam menjalankan hubungan antara masyarakat yang terorganisasi, diplomasi, dengan penerapan metode negosiasi, persuasi, tukar pikiran, dan sebagainya, mengurangi kemungkinan penggunaan kekuatan yang sering tersembunyi di latar belakang.

Meskipun tampaknya pertimbangan politik muncul sebagai perhatian utama diplomasi sebuah negara, faktor-faktor ekonomi ternyata juga tidak kurang penting.<sup>9</sup> Negara-negara kapitalis terus sibuk dalam mencari tempat berpijak di pasar-pasar baru dan pada saat yang sama berusaha keras mengamankan kepentingan ekonomi mereka di daerah mana mereka telah mampu mempertahankan kehadiran mereka dengan menghilangkan kompetisi. Selama ratusan tahun diplomasi komersial sebagai tujuan kebijaksanaan nasional telah memperoleh landasannya yang kuat. Negara-negara yang secara teknologi maju telah berusaha mengeksploitasi negara-

---

<sup>9</sup> K.M. Panikkar, *The Principles and Practice of Diplomacy*, hal. 29.

negara yang secara ekonomi lemah dan terbelakang. Penggunaan sebutan seperti "imperialisme ekonomi", "diplomasi dollar", dan sebagainya, membuktikan kenyataan ini. Dengan lahirnya Laissez Faire dan sistem perdagangan bebas serta menimbulkan dampak antar penekanan ekonomi nasional, negara-negara maju maupun terbelakang telah menjumpai kenyataan bahwa perdagangan dan keuangan bisa digunakan sebagai alat utama kebijaksanaan nasional. Akibatnya, pencapaian perolehan-perolehan ekonomi telah menjadi tujuan penting dari diplomasi.<sup>10</sup>

Sesudah PD II banyak koloni memperoleh kemerdekaan dan muncul sebagai negara berdaulat. Tetapi mereka sadar bahwa kemerdekaan politik saja tidak akan berarti tanpa disertai kemajuan ekonomi. Negara-negara industri mencoba untuk mengeksploitasi keadaan ini bagi keuntungan mereka. Panikkar menyatakan bahwa "industrialisasi bergantung antara lain, pada barang-barang modal dan negara-negara industri yang besar yang bisa memenuhi kebutuhan ini dengan demikian ditempatkan pada sebuah kedudukan untuk tawar-menawar keuntungan politik dan ekonomi bagi investasi modal, bagi kebebasan berdagang, dan sebagainya. Kuota, lisensi, pengendalian uang dan teknik-teknik hubungan komersial lainnya kini telah menjadi instrumen diplomasi yang biasa."<sup>11</sup> Negara-negara maju telah berjuang memperoleh hak-hak istimewa dan negara-negara terbelakang setelah memberikan bantuan kepada mereka. Terkadang hak-hak istimewa ini, apabila diperoleh, melanggar status kedaulatan negara-negara yang baru saja merdeka. Oleh karena itu pergulatan berjalan terus antara pemberi bantuan

---

<sup>10</sup> Hans. J. Morgenthau, *Politics Among Nations*, hal. 69-70.

<sup>11</sup> *Op. Cit.*, hal. 30.

dan pencari bantuan untuk memperoleh hubungan yang lebih baik. Di sinilah diplomasi dibutuhkan untuk memainkan peranan penting karena kedua belah pihak telah mempertaruhkan kepentingan masing-masing.

Dulu di bawah keadaan seperti itu negara-negara lemah dan terbelakang menjumpai situasi yang sulit. Tapi di dunia sekarang ini yang secara luar terbagi ke dalam dua kamp ideologi yang bertentangan. Kedua belah pihak berusaha bisa menarik negara-negara yang baru saja merdeka itu ke kubu mereka masing-masing dengan menawarkan kerja sama yang lebih baik. Hal ini sangat menaikkan bargaining power (kekuatan tawar-menawar) negara-negara yang baru muncul tadi. Pergulatan untuk memperoleh hak-hak istimewa terus berlanjut antara negara sosialis dan kapitalis serta antar negara kapitalis sendiri melalui kontes yang ketat untuk menguasai pasar di negara-negara yang belum maju. Untuk memperoleh jalan masuk bagi pasar-pasar baru. Mereka memberi konsesi yang selain untuk kompetisi tidak mereka berikan. Ini juga menambah kapasitas bargaining negara-negara lemah. Maka kedua belah pihak memakai metode-metode diplomatik untuk memperoleh keuntungan-keuntungan yang lebih besar.

Kemajuan yang sangat pesat dalam bidang komunikasi dan saling keterkaitan antar negara yang berbeda telah memberi fasilitas yang sangat besar bagi perdagangan Internasional yang sekarang ini terutama dikendalikan oleh negara dan dengan jelas tiap negara berusaha untuk memapankan suatu pola perdagangan yang cocok bagi perekonomiannya. Negosiasi diplomatik dilakukan untuk meningkatkan kepentingan dagang. Untuk melayani kepentingan dagang dan ekonomi, diplomasi modern telah

mengembangkan sebuah mekanisme khusus yang sama sekali berbeda dengan konsulat-konsulat lama.<sup>12</sup>

Diplomasi telah selalu memainkan peranan besar dalam mengatur kebijakan-kebijakan Internasional. Banyak masalah yang nyata-nyata bisa diselesaikan melalui diplomasi. Sebagian besar dari masalah-masalah Internasional tersebut harus diselesaikan melalui kompromisi. Dan ini bisa dicapai melalui diplomasi. Sehubungan dengan ini penelitian Richard W. Sterling patut diperhatikan. Sterling mengatakan "sungguh, diplomasi adalah politik hubungan Internasional: politik Internasional bagi arti yang tepat bagi istilah itu".<sup>13</sup>

Beragamnya cara pendekatan dan berkomunikasi antar pemerintah antar negara dalam diplomasi tersebut kemudian menimbulkan berbagai istilah seperti: diplomasi politik, diplomasi ekonomi, diplomasi budaya, diplomasi pertahanan, diplomasi olah raga, dan lain-lain.

#### **Diplomasi Kebudayaan**

Diplomasi kebudayaan merupakan perkembangan/kelanjutan dari diplomasi konvensional. Sedangkan perubahan diplomasi dari arti sempit ke arti yang luas seperti tersebut di atas telah terjadi sejak abad ke-18. Dikatakan dalam buku tulisan Rosecrance (1963) bahwa penyebab perubahan tersebut adalah timbulnya propaganda, subversi besar-besaran dan manipulasi penggunaan senjata tekanan ekonomi sebagai politik luar negeri, bahkan juga

---

<sup>12</sup> K.M. Panikkar, *Op. Cit.*, hal. 30-31.

<sup>13</sup> S.L. Roy, *Diplomacy*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1995, hal. 24.

pemanfaatan pertukaran budaya dan pendidikan sebagai alat dalam perang dingin.<sup>14</sup>

Tentang diplomasi ini Karl. W. Deutsch menulis bahwa:  
 "..... If diplomacy depended partly upon cultural communications and political economic and historical ties, some degree of North Atlantic cohesion might survive after cooperation was no longer strictly necessary on grounds of threats to the peace. If diplomacy was a product of military – political factors only, the gulencence of Russia, and the resurgence of China should produce entirely new constellations of force...<sup>15</sup>

Pertukaran kebudayaan dilakukan dengan mengirim dan menerima delegasi kebudayaan dalam membina hubungan dengan negara-negara lain. Pertukaran kebudayaan memungkinkan rakyat masing-masing untuk mengetahui pandangan satu sama lain dengan cara yang damai. Tujuan diplomatik dengan mengirim delegasi kebudayaan adalah untuk memamerkan tingginya kebudayaan suatu negara, yang diharapkan akan mampu mempengaruhi pendapat umum (massa) negara tujuan. Apalagi suatu negara mampu mengesankan negara lain dengan warisan kebudayaannya dan mengeksponnya ke bagian dunia lain, hal akan mempermudah pembangunan basis yang kuat untuk memperoleh dukungan atas masalah-masalah lain dalam hubungan antara kedua negara.

Ekshibisi kebudayaan sering lebih berguna daripada pameran kekuatan militer. Pernah dikatakan oleh J.W. Fulbright bahwa:

---

<sup>14</sup> Philip Coombs. *The fourth dimension of foreign policy: Educational and Cultural Affairs*, Harper, New York.

<sup>15</sup> Karl W. Deutsch, *Nationalism and Social Communication, an Inquiry Into the foundations of nationality*, M.I.T. Press, Cambridge, Massachussets, Wiley, New York:

"..... bentuk dunia, satu generasi sesudah ini akan dipengaruhi oleh seberapa baik kita mengkomunikasikan nilai-nilai masyarakat kita kepada negara lain, masalah besar tentang bagaimana aspirasi umat manusia bisa dipenuhi sebaik-baiknya akan diputuskan.... di pikiran manusia, tidak di medan tempur atau di meja konferensi."

Napoleon mengetahui nilai penaklukan kebudayaan. Dalam sebuah refleksinya di St. Helena berkata, "Aku terpaksa menaklukkan Eropa dengan pedang: orang yang berikutnya akan menaklukkannya dengan jiwa. Karena jiwa selalu lebih kuat daripada pedang." Bagi Napoleon dan pemimpin-pemimpin Perancis sesudah dia, hal ini bukan nostalgia atau sentimen, tetapi kenyataan, "ekspansi intelektual dan moral" seperti yang disebut oleh bangsa Perancis ditujukan kepada kelompok elit masyarakat dan menjadi instrumen utama dalam membangun dan mengasimilasikan imperium kolonial kedua di akhir abad sembilan belas. Kapan saja memungkinkan, penetrasi kebudayaan akan menjadi suatu kekuatan. "Aspirasi politik dan invasi militer apa yang pernah berhasil, dengan pengorbanan yang sedikit, untuk memperoleh hasil-hasil yang demikian penting dan bertahan lama?" tanya seorang deputy Perancis kepada para sahabatnya di tahun 1900.<sup>16</sup> Memang, imperialisme kebudayaan merupakan suatu usaha untuk menaklukkan dan menguasai jiwa manusia serta sebagai sebuah instrumen untuk mengubah hubungan power antara kedua negara.

Hubungan kebudayaan bisa banyak membawa dua bangsa menjadi lebih dekat. Kelebihan faktor-faktor budaya ini sudah diakui oleh banyak negara-negara yang berpikiran maju. Ini sebabnya mengapa negara-negara

---

<sup>16</sup> Philip H. Coombs. *Op. Cit.*, hal. 79.

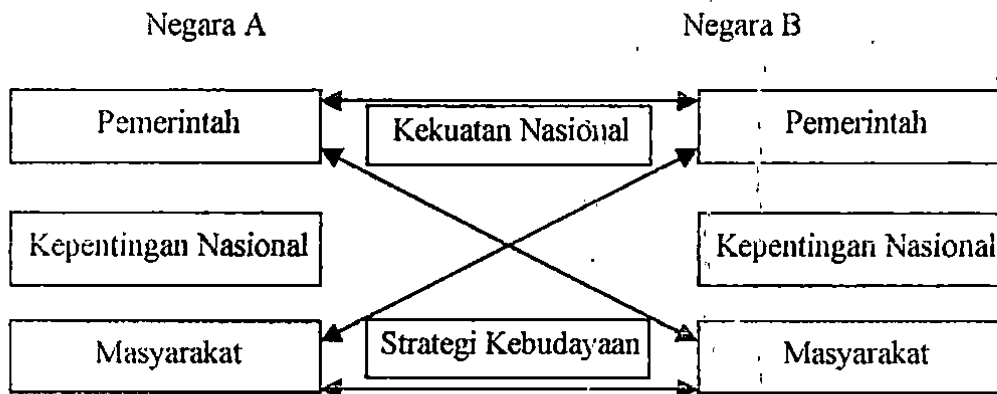


sekarang sibuk memapankan hubungan-hubungan kebudayaan mereka menyelenggarakan program-program pertukaran kebudayaan di negara-negara lain, dimana pusat-pusat kebudayaan, pada saat ini telah menjadi alat diplomasi yang efektif.

Diplomasi kebudayaan yang sasarannya adalah publik secara luas ini, adalah merupakan salah satu perkembangan dari diplomasi konvensional yang sasarannya adalah para elit dan pimpinan negara tujuan. Walaupun bentuk diplomasi kebudayaan ini berbeda dengan diplomasi konvensional, namun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mendukung tercapainya penyelesaian masalah-masalah politik yang timbul di antara kedua pihak. Dengan adanya saling tukar informasi tentang kebudayaan masing-masing, maka masalah-masalah politik yang timbul akan dipecahkan dengan lebih baik, karena telah ada saling pemahaman yang lebih baik pula antara kedua pihak.

Diplomasi kebudayaan dapat pula dilihat dari dua tingkat sisi politiknya yaitu:

1. Tingkat supra struktur politik, yaitu struktur politik pada lapisan atas, di kalangan pemerintah/elit.
2. Tingkat infra struktur politik, yaitu struktur politik pada lapisan rakyat/massa.

Skema 1 : Pelaku dan Sasaran Diplomasi Kebudayaan<sup>17</sup>

Memang dengan diplomasi kebudayaan tidak mungkin diharapkan dampak/ hasil yang langsung seperti pada diplomasi konvensional (politik). Diplomasi politik merupakan usaha yang langsung pada sasaran (pada pemerintah/elit negara sasaran), dan dampaknya juga dapat diharapkan langsung dari pemerintah tersebut, sedangkan diplomasi kebudayaan adalah usaha dengan obyek sasaran massa (tidak langsung pada pemerintah negara sasaran). Sehingga masuk akal bila dampak silang/feed back dari diplomasi kebudayaan ini pada proses decision making elit negara tujuan tadi juga tidak bisa diharapkan bisa langsung terjadi.

Film yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari fotografi dan termasuk juga sebuah hasil berkesenian dan berkreasi, menjadikan film sebuah kecenderungan yang kompleks. Di dalamnya terkandung berbagai aspek lain. Sebuah film bisa merupakan ekspresi dari pencipta, namun juga bisa pandangan pencipta terhadap sesuatu. Bisa juga merupakan suatu potret dari suatu masyarakat, atau juga sebagai impian dan kritik pencipta terhadap

<sup>17</sup> Warsito, Tulus. *Diplomasi Kebudayaan*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1997

diri dan lingkungannya dan lingkungan lain, atau bahkan merupakan gabungan-gabungan kompleks dari keseluruhan kecenderungan-kecenderungan tersebut.<sup>18</sup> Dengan kata lain film merupakan suatu hasil dari interpretasi pencipta film terhadap sesuatu maupun kondisi atau situasi dari lingkungannya maupun lingkungan yang lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah film adalah kegelisahan yang dialami oleh pencipta dan ia merasa pihak lain perlu untuk mengetahui. Pandangan tersebut bisa juga didukung oleh pendapat bahwa film juga sarana hiburan dan industri. Ini disebabkan karena kebanyakan film dibuat sebagai sarana hiburan dan tentu untuk mencari keuntungan oleh pembuat film maupun dari industri film tersebut.

Sejak ditemukan pada akhir abad ke 19, film telah banyak mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi yang dipakai dan mendukung dalam sebuah pembuatan film. Pada awalnya film dikenal hanya sebagai gambar hitam putih dan tidak bersuara atau lebih dikenal dengan film bisu. Baru pada tahun 1930 film yang berwarna mulai diketemukan.<sup>19</sup> Seiring dengan perkembangan yang dialami oleh film (dari film yang tidak berwarna sampai berwarna) peralatan untuk memproduksi film juga mengalami perkembangan terlebih setelah komputer grafik digunakan dalam produksi film.

Penggunaan teknologi menjadikan film semakin realitas dan enak untuk ditonton. Kita dapat melihat apa yang sebenarnya mustahil untuk dilihat seperti kita tidak mungkin untuk melihat seekor dinosaurus tetapi

---

<sup>18</sup> Philip Cheah dkk, *Membaca Film Garin*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal 187

<sup>19</sup> Marselli Sumarno, *Op.Cit*, hal 9

dengan teknologi yang digunakan oleh film maka kita pun kemudian dapat melihat dinosaurus seperti apa yang ada dalam pikiran kita. Tujuan film adalah untuk merealisasikan atau memvisualkan apa yang dipikirkan oleh pembuat film tersebut.

Film juga tidak luput dari getah-getah kehidupan politik suatu negara. Sebagaimana umumnya fungsi media yang lain, film juga mengandung nilai komunikasi lebih yaitu bisa berbicara kepada khalayak secara audio dan visual, turut dan sering digunakan oleh suatu negara untuk dijadikan sebagai bahasa politik dan komoditas yang strategis.

Dalam perkembangan selanjutnya, fungsi film bertambah menjadi media pemasukan nilai-nilai yang diyakini suatu negara. Tentu saja yang menjadi sasaran dari pemasukan nilai-nilai tersebut adalah publik. Tak pelak, film yang notabene adalah produk budaya, tercelup pula oleh tangan kekuasaan sehingga pada akhirnya digunakan sebagai alat politik.

Jika pada akhirnya Amerika menggunakan film sebagai pembantu ruang geraknya sebagai negara penguasa, hal tersebut adalah sangat wajar. Sebagai negara adidaya, Amerika mempunyai fasilitas teknologi dan pendidikan terhadap masyarakatnya yang memadai. Tunjangan terhadap kreativitas pribadi, komunitas maupun industri terbuka secara lebar hingga akhirnya menjadikan suatu kewajaran jika pada akhirnya warga atau masyarakat Amerika mempunyai semangat kebangsaan yang kuat sebagai upaya balas budi terhadap negara.

Industri film Hollywood contohnya. Pabrik film itu diberi keleluasaan seluas-luasnya untuk mengekspresikan nilai-nilai Amerika. dalam setiap film-film yang diproduksi. Hasil yang terjadi tentu saja tidak jauh dari tujuan nilai tersebut. Senantiasa meletakkan Amerika sebagai aktor film atau *landscape* film yang penuh dengan asumsi positif. Amerika selalu diberi peran yang berlebihan, baik sebagai si pemenang, yang terbaik bahkan sebagai sosok kekuatan yang tak tertandingi.

Dari ikon-ikon yang ditampilkan dengan sangat kentara Hollywood memajang dirinya sebagai perpanjangan tangan Amerika untuk semakin mengukuhkan Amerika sebagai pahlawan dunia, hal tersebut semakin memperkuat asumsi bahwa pada akhirnya film akan digunakan oleh suatu negara untuk memperlancar kepentingan politiknya. Baik pemasokan nilai-nilai yang diyakini kepada publik, atau yang lebih keras lagi menilai secara sepihak kualitas masyarakat lain demi mencapai tujuan politik. Dengan kata lain film digunakan sebagai bahasa politik suatu negara untuk memperjualbelikan seperangkat tujuan politik suatu negara terhadap negara lain, atau suatu masyarakat terhadap masyarakat lain.

## **2. Konsep Propaganda**

Propaganda didefinisikan sebagai usaha sistematis yang bertujuan untuk membentuk atau mengubah sikap, pendapat dan tindakan suatu kelompok yang menjadi sarannya melalui simbol-simbol verbal, tulisan,

dan perilaku dengan menggunakan media seperti buku-buku, pamflet, film, ceramah, radio, televisi dan lain-lain.<sup>20</sup>

Film sebagai suatu produk budaya, juga merupakan alat propaganda yang strategis juga sarat dengan kemungkinan-kemungkinan keberhasilan yang padat. Sebab secara teoritis karakteristik dari konsep propaganda didasarkan pada ciri-ciri pola komunikasinya dan bukan pada bidang operasi atau bidang-bidang disiplin yang dilibatkannya.

Untuk mendapatkan perhatian sebagaimana dikehendaki, propaganda harus diletakkan pada dasar hubungan antara dirinya dengan sasarannya menurut kepentingan maupun pandangan hidupnya. Hal tersebutlah yang menjadikan pelaku propaganda cenderung untuk menekankan minat-minat dan sifat-sifat yang sama. Amerika sebagai negara industri yang senantiasa berusaha memonopoli laju perkembangan ekonomi maupun budaya ditingkatan global menempatkan film sebagai alat propaganda. Alasannya jelas, film sarat dengan nilai komunikasi. Dan melalui film-film yang diproduksinya, Amerika dan Hollywood memasok nilai dirinya sendiri kepada masyarakat global, juga meneruskan upayanya sebagai polisi dunia untuk senantiasa memulai dengan caranya sendiri melalui film.

## **F. Hipotesa**

Dari rumusan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peran film dalam Diplomasi Kebudayaan Amerika adalah sebagai alat propaganda yang

---

<sup>20</sup> Gunawan Muhammad, *Catatan Pinggir Kali 4*, Grafiti, Jakarta, 1995, hal 289-290

paling efektif dalam menunjang keberhasilan Diplomasi Kebudayaan Amerika Serikat.

### **G. Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Sumber data bersifat literatur, yang diperoleh melalui buku-buku perpustakaan, jurnal, majalah, dan artikel yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini.

## **II. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari : Alasan pemilihan judul, Tujuan Penelitian, Latar belakang masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Teoritik, Hipotesa, Sistematika Penulisan, Kerangka Penulisan, dan terakhir Rencana Kepustakaan.

Bab II, Mendeskripsikan Diplomasi Kebudayaan Amerika mengenai gambaran umum tentang diplomasi kebudayaan di Amerika termasuk bentuk-bentuk diplomasi kebudayaannya selain melalui film.

Bab III, Mendeskripsikan bagaimana perfilman di Amerika yang akan membahas tentang sejarah perfilman Amerika, bentuk propaganda Amerika lewat film, film sebagai media propaganda Amerika, dan propaganda Amerika melalui film-film perang produksi Hollywood.

Bab IV, Bab ini mencoba untuk membahas film sebagai sarana diplomasi Amerika, yang akan menjelaskan tentang fungsi film dalam masyarakat dan hubungan antara diplomasi kebudayaan dengan film perang Amerika, serta kerjasama antara pentagon dan film perang amerika.

Bab V, Kesimpulan dan Penutup, berisi penyimpulan dan kata penutup yang dapat ditarik dari pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya.